

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara termasuk Negara Indonesia tidak asing dengan yang namanya perekonomian. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dengan adanya transaksi ekonomi yang dilakukan makhluk sosial yaitu manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan kegiatan usaha yang dimiliki. Namun pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha selalu tidak diimbangi dengan kemampuan dalam hal ini yaitu keuangan, karena alasan inilah banyak orang yang menggunakan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk menunjang keuangan mereka. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di suatu Negara. Mayoritas warga Negara Indonesia juga bergantung pada lembaga-lembaga keuangan yang saat ini banyak bermunculan untuk mendapatkan bantuan pendanaan dan menabung.

Ada banyak lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang siap menawarkan jasa dan produk-produk dalam hal keuangan. Namun pada kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah yang belum atau tidak memiliki akses ke lembaga keuangan bank. Mulai dari jarak lembaga keuangan bank yang jauh dari tempat tinggal, produk yang ditawarkan tidak sesuai, serta persyaratan

yang diberikan rumit menjadi beberapa alasan yang sering disampaikan masyarakat dan akhirnya memilih alternatif yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank banyak diminati oleh masyarakat karena syarat-syarat yang diberikan untuk mendapatkan layanan jasa keuangan lebih mudah, memiliki cabang yang menjangkau pelosok-pelosok negeri dan layanan yang ditawarkan lebih banyak pada kredit-kredit konsumtif yang mana diperlukan dan erat kaitannya dengan masyarakat. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang sering dimanfaatkan dan juga banyak diminati oleh masyarakat adalah koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi berbadan hukum yang bergerak di bidang perekonomian. Dalam pertumbuhan ekonomi, koperasi merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peranan penting. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan”.² Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*.

Undang-Undang Dasar 1945.³ Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:⁴

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya".

Berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan bertakwa. Hal ini sesuai dengan koperasi yang merupakan wadah untuk bekerjasama, kekeluargaan, tolong menolong, saling menutupi kebutuhan antar anggotanya. Koperasi sebagai suatu unit usaha memiliki dan menetapkan visi dan misi untuk dijadikan landasan perbedaan dan alat untuk bersaing dengan usaha-usaha lain serta untuk membantu mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran tertentu yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan sasaran tersebut seperti ingin mendapatkan laba yang maksimal, memberikan pelayanan yang baik dan kesejahteraan kepada anggota dan masyarakat, dan mengupayakan agar setiap kegiatan dan rencana unit usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu perlu adanya suatu alat yang dapat untuk mengendalikan aktivitas operasi koperasi agar kinerja dari

³ Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*.

⁴ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2000), hlm. 225.

koperasi semakin baik dan kemampuan koperasi dalam mensejahterakan anggotanya semakin besar karena salah satu keberhasilan atau kesuksesan suatu koperasi adalah apabila mampu mensejahterakan anggotanya. Koperasi harus selalu mengupayakan bagaimana agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan dengan efisien agar kelangsungan hidup koperasi tetap dapat bertahan. Apabila kebijaksanaan yang telah dibuat dan diterapkan oleh koperasi tidak dijalankan sesuai perintah dan tidak ketat, maka kemungkinan adanya kekeliruan dan tindakan penyelewengan atau kecurangan akan semakin besar, kemudian akan menimbulkan kondisi dimana resiko yang dihadapi juga besar. Oleh karena itu manajemen koperasi dituntut agar dapat menciptakan suatu struktur pengendalian internal. Untuk mengetahui pengendalian internal yang dijalankan sudah efisien dan efektif diperlukan pemantauan dan pemeriksaan terus menerus oleh manajemen koperasi. Struktur pengendalian internal yang baik sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan bawahannya agar tetap sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Saat ini kegiatan usaha koperasi tidak hanya berbentuk koperasi simpan pinjam saja. Banyak koperasi yang juga mengembangkan dan menambah kegiatan usahanya menjadi unit pertokoan atau perdagangan, minimarket dan pelayanan jasa. Seperti koperasi yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur

(Dopusbektim) Surabaya memiliki beberapa jenis unit usaha, diantaranya:⁵

1) Unit simpan pinjam, 2) Unit usaha pertokoan, 3) Unit peminjaman elektronik, 4) Unit Rekanan Dinas, dan 5) Unit Jasa Laundry.

Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya lebih menekankan kegiatan usahanya pada unit usaha simpan pinjam dan pertokoan. Pada unit usaha simpan pinjam melayani anggotanya dengan menerima simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dana pada anggotanya. Unit usaha pertokoan melayani dan menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk anggota dan masyarakat. Tujuan didirikannya Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar lingkungan kerja.⁶ Namun tidak semua orang dapat menjadi anggota di Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya, yang dapat menjadi anggota Primkopal yaitu para Personil Militer/PNS yang merupakan anggota tetap dari Dopusbektim Surabaya.

Setiap badan usaha apapun itu bentuknya pasti mengharapkan diperolehnya keuntungan atau laba yang wajar termasuk koperasi yang melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan mempunyai berbagai macam jenis unit usaha, dari kegiatan yang dilakukan oleh koperasi terdapat kegiatan pokok yaitu penjualan kredit dan

⁵ Wawancara dengan Pak Kariem selaku Sekretaris Primkopal Dopusbektim pada 2 September 2020.

⁶ Wawancara dengan Pak Kariem selaku Sekretaris Primkopal Dopusbektim pada 2 September 2020.

kegiatan simpan pinjam yang merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan dan meningkatkan keuntungan atau profit namun disaat yang bersamaan juga dapat mengakibatkan kerugian karena dari kegiatan penjualan kredit dan simpan pinjam tersebut akan menimbulkan piutang. Piutang memiliki pengaruh yang juga cukup penting bagi kelangsungan hidup koperasi dan merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva lancar.

Pelunasan piutang merupakan sumber bagi tersedianya modal kerja dan merupakan unsur yang paling penting bagi koperasi. Sehingga hal yang sangat penting sekali adalah kelancaran dalam pelunasan piutang karena sangat mempengaruhi kegiatan usaha suatu koperasi.⁷ Untuk itu, koperasi perlu penanganan yang lebih baik terhadap piutang dan pelaksanaan pengendalian internal piutang usaha agar risiko-risiko yang dapat merugikan koperasi dapat dihindari.

Dalam sistem informasi akuntansi, menurut Romney dan Steinbart⁸, pengendalian internal adalah sebuah proses yang menyebar keseluruhan aktivitas pengoperasian organisasi dan bagian integral dari aktivitas manajemen dimana proses yang diterapkan untuk menyediakan jaminan yang sesuai untuk tujuan pengendalian berupa pengamanan aset dalam mencegah dan menemukan tindakan kecurangan atau penyelewengan, mengelola catatan secara detail dengan baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar, menyediakan informasi yang akurat dan

⁷ Tetiniati Sarumaha, *Analisis Efektivitas Pengelolaan dan Sistem Pengendalian Piutang pada Koperasi Masyarakat (KOMAS) Bumiputera Telukdalam Periode 2011-2015*, (Telukdalam: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan, 2017), diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

⁸ Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, *Accounting Information System – Thirteenth Edition*, (Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2014), hlm. 190.

dapat diandalkan, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Namun untuk dapat mencapai hal tersebut, koperasi membutuhkan berbagai cara dan teknik yang dapat berdampak pada kemajuan dan perkembangan koperasi. Terdapat 5 komponen pengendalian internal menurut COSO, yaitu:⁹ 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penaksiran Resiko, 3) Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi Dan Komunikasi, dan 5) Pemantauan. SA Seksi 319 paragraf 7 juga menyebutkan 5 komponen pengendalian internal, yaitu:¹⁰ 1) Lingkungan Pengendalian, menetapkan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian, 2) Penaksiran Resiko, untuk tujuan pelaporan keuangan adalah indentifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, 3) Kegiatan Pengendalian, kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan, 4) Informasi Dan Komunikasi, serta 5) Pemantauan, proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Komponen-komponen tersebut menjadi penilaian apakah pengendalian internal yang diterapkan sudah efektif dan efisien. Muslich

⁹ Ibid, hlm. 195.

¹⁰ Mulyadi, *Auditing Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 183.

menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Iswahyudi dan Dwi, bahwa pengelolaan piutang yang efektif akan memberikan pengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.¹¹ Pada penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang timbul di Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya yaitu keterbatasan kemampuan dan keahlian tenaga/pengurus koperasi karena ada beberapa pengurus dan karyawan koperasi yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linier dengan posisi dan pekerjaan yang dibutuhkan koperasi serta masih ada beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh satu orang pegawai. Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya juga berada pada lingkup kedinasan khususnya TNI-AL dan menggunakan sistem potong gaji untuk pembayaran angsuran menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian apakah sistem pengendalian internal piutang usaha Primkopal Dopusbektim Surabaya sudah efektif dan efisien. Menurut Hery, sebagaimana dikutip oleh Natalia, Santirianingrum, dan Rony, jika berbicara mengenai pengendalian internal atas piutang usaha, maka sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas piutang, baik dari segi pengamanan atas perolehan fisik kas, pemisahan tugas (termasuk masalah otorisasi persetujuan kredit), sampai pada tersedianya data catatan akuntansi yang

¹¹ Iswahyudi dan Dwi Prastowo Darminto, “Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Usaha dengan Menggunakan Pendekatan COSO”, *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 31-44.

akurat.¹² Setiap badan usaha tak terkecuali koperasi dalam menjalankan aktivitasnya pasti akan menemui masalah-masalah yang menghambat kelancaran dan keberhasilan segala macam usaha, dan hal ini tentu harus didukung juga dengan adanya kemauan dan kesadaran dari anggota dan masyarakat sekitar lingkungan untuk berperan aktif serta ikut berpartisipasi. Untuk mampu melaksanakan, mengelola, dan menjalankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan maka pengendalian internal yang baik perlu diterapkan agar dapat mengatasi beberapa kelemahan yang ada, menghindari penyelewengan dan kecurangan yang terjadi di dalam kegiatan koperasi, meminimalisir resiko-resiko dan kerugian koperasi, serta tujuan dan sasaran koperasi dapat tercapai. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha pada Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengendalian internal piutang usaha yang diterapkan oleh Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya?

¹² Natalia Nur Afifah, Santirianingrum Soebandhi, dan Rony Wardhana, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Pada PT GIS”, *e-Journal Spirit Pro Patria*, Vol. 1 No. 1, April 2015, hlm. 54-68.

2. Apakah prosedur pengendalian internal piutang usaha pada Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya sudah efektif dan efisien?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pengendalian internal piutang usaha pada Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pengendalian internal piutang usaha pada Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya apakah sudah efektif dan efisien.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan efektivitas sistem pengendalian internal piutang usaha pada Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya yaitu data yang berhubungan dengan piutang usaha oleh Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu akuntansi keuangan terutama dalam aspek pengendalian piutang usaha.
- b. Menerapkan teori yang telah diperoleh dalam proses belajar mengajar dan mendukung teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga atau Instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan tentang pengendalian internal terhadap piutang usaha.
- b. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan berguna sebagai perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung untuk menjadi salah satu sumber rujukan dalam kegiatan pembelajaran.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya ataupun peneliti sejenis nantinya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).¹³

b. Pengendalian

Menurut George R. Terry, sebagaimana dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan, pengendalian adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹⁴

c. Pengendalian Internal

Menurut Hery, sebagaimana dikutip oleh Edy dan Miftahurrohman, pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektif>, diakses 25 Desember 2020.

¹⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 242.

undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh karyawan perusahaan.¹⁵

d. Piutang

Piutang menurut Hery adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan dari pihak lain, baik sebagai akibat dari penyerahan barang dan jasa secara kredit, memberikan pinjaman, maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain.¹⁶

e. Piutang Usaha

Piutang usaha menurut Hery adalah jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit.¹⁷

f. Koperasi

Menurut Sapoeira Karto definisi dari Chaniago, sebagaimana dikutip dalam Theodulus, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.¹⁸

¹⁵ Edy Siswanto dan Miftahurrohman, “Sistem Informasi Pengendalian Intern Atas Piutang Untuk Meminimalkan Jumlah Piutang Tak Tertagih Pada KSU Makmur Mandiri Menggunakan Metode Umur Piutang”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 8 No. 2, September 2017, hlm. 45-52.

¹⁶ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 265.

¹⁷ Ibid, hlm. 266.

¹⁸ Theodulus Sunu Mahata, *Evaluasi Pengendalian Intern Pemberian Kredit Konsumsi Dalam Koperasi Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma, 2008), hlm. 7.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka dapat disusun definisi operasional “Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha pada Primkopal Depo Pusat Pembekalan Timur (Dopusbektim) Surabaya” merupakan penelitian yang membahas efektivitas dari suatu rangkaian tindakan untuk mengatur, mengawasi dan mengukur salah satu sumber daya suatu organisasi yaitu piutang usaha agar dapat membantu organisasi mencapai target atau tujuan tertentu, pengendalian internal atas piutang usaha diperlukan karena jika terdapat hutang tidak bisa ditagih maka akan menjadi kerugian atau beban bagi organisasi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Setelah penelitian selesai dilakukan dan memperoleh hasil yang diinginkan, maka peneliti bermaksud untuk memberikan hasil uraian yang menggambarkan hasil penelitiannya dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama pada peneliti ini berisikan enam bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, (g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka, (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis.

BAB III: Metode penelitian, terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian, terdiri dari (a) paparan data dan (b) temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sistesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI: Penutup, terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.

3. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.